

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat yang terletak di Jln. Soekarno Hatta No.2 Onolimbu –Lahomi, 22865, Gedung Kantor DPRD Kabupaten Nias Barat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Nias Barat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sebagai salah satu entitas pelaporan keuangan, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Salah satu standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.

Penerapan PSAP No. 11 bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang menyeluruh atas entitas pelaporan, termasuk entitas akuntansi di bawahnya. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat telah menerapkan standar tersebut dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian serta kendala-kendala yang dihadapi dalam prosesnya

3.1.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat

Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD. Sekretariat ini dibentuk seiring dengan berdirinya Kabupaten Nias Barat sebagai daerah otonom baru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan kabupaten ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, serta memperluas jangkauan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Kabupaten Nias Barat secara resmi diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan sejak saat itu pemerintahan daerah mulai dibentuk dan dijalankan. Dalam struktur pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif memiliki kedudukan yang sangat penting. Untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD, dibentuklah Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat ini juga memfasilitasi pelaksanaan sidang, rapat-rapat, penyusunan risalah, pengelolaan dokumentasi, serta penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 2, Onolimbu–Lahomi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nama gedung resmi: Kantor DPRD Nias Barat. Gedung ini menjadi pusat kegiatan seluruh administrasi dan operasional DPRD serta tempat pelaksanaan rapat-rapat dan kegiatan kelembagaan lainnya.

DPRD Kabupaten Nias Barat saat ini terdiri dari 20 orang anggota yang berasal dari 8 partai politik. Komposisi ini mencerminkan representasi politik masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nias Barat, yang terdiri atas 8 kecamatan dan 105 desa, dengan total luas wilayah mencapai 473,73 km². Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Nias Barat diperkirakan

mencapai 92.154 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 194 jiwa per km². Kepemimpinan daerah untuk masa jabatan 2025–2030 dijabat oleh:

1. Bupati: Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si.
2. Wakil Bupati: Sozisokhi Hia, S.H., M.M.

Peralihan pemerintahan dari periode sebelumnya ke periode saat ini ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori jabatan, sebagai bentuk transparansi dan kesinambungan roda pemerintahan daerah.

Sejak awal berdirinya hingga saat ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat terus berbenah untuk mewujudkan pelayanan administrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sekretariat ini memiliki peran penting dalam menjamin kelancaran fungsi-fungsi kelembagaan DPRD dan mendukung keberhasilan pembangunan daerah melalui kerja sama yang sinergis antara legislatif dan eksekutif. Berikut ini disajikan beberapa nama pegawai yang bertugas di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat sebagai bagian dari struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan DPRD.

Tabel 3. 1 Daftar Nama Pegawai

No	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan
1	Setiabudi Halawa, S.Sos.,MM	Pembina Tk.1	Sekretaris DPRD
2	Yupiter Hia, ST.,M.Si	Pembina	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
3	Fa'ano Gulo, S.Th.,MM	Pembina	Kabag Administrasi Kesekretariatan
4	Agus Sefri Rosmalina Hia, SH.,M.I.P	Pembina	Kabag perundang- Undangan dan Persidangan
5	Erniman Zebua	Penata TK.1	Kasubbag Tata

			Usaha dan Kegiatan
6	Riasni Kalebos, A.MD	Penata Muda Tk.1	Kasubbag Program dan kegiatan
7	Leon Zidomi, SH .,M.I.P	Penata	Sub Koordinator Penganggaran
8	Amoni'o Zai,SE	Pembina Tk.1	Penyusunan Rencana Pengawasan
9	Noverman Daeli, S.Si.,MM	Penata Tk.1	Penyusun Risalah
10	Pance Warta Kasih Daeli, ST	Penata Tk.1	Penyusunan program Anggarandan Pelaporan
11	Nikamis Daeli,S.A.P	Penata Muda Tk.1	Analisis Rencana Program dan Kegiatan
12	Realis Eli Putera Hia, SH	Penata Muda Tk.1	Analisis Peraturan Perundang- undangan dan Rancangan
13	Ebid Adi Sarumaha, S.E	Penata Muda Tk.1	Analisis Humas
14	Yamosokhi Waruwu, S.E	Penata Muda	Pengelolaan Kepegawaian
15	Yulianus Putra Zebua	Pengatur Muda	Pengadministras i Umum

3.1.2 Visi dan Misi

Dalam rangka memahami arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui lembaga legislative, maka perlu disampaikan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan administratif terhadap DPRD berikut adalah visi dan misi Sekretariat DPRD kabupaten Nias Barat:

1. Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat

Mewujudkan Masyarakat adil makmur, berdaya saing, inovatif, berkelanjutan dan lestari berkeradaban.

2. Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat

- Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- Memberikan dukungan administrative dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, terutama dalam hal legilasi, anggaran, dan pengawasan.
- Menyediakan tenaga ahli dan sumber daya pendukung yang profesional guna membantu DPRD dalam menjalankan hak, kewenangan, serta fungsinya secara optimal.

Dengan adanya visi dan misi tersebut, Sekretariat DPRD kabupaten nias barat diharapkan mampu memberikan dukungan optimal terhadap kinerja DPRD, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.

3.1.3 Motto Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat

Melayani dengan Profesional, Mendukung dengan Totalitas.

Motto ini mencerminkan komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat dalam memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif yang berkualitas tinggi kepada seluruh anggota DPRD. Dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, setiap unsur di lingkungan sekretariat diarahkan untuk bekerja secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.

“Melayani dengan profesional” menekankan pentingnya integritas, ketepatan waktu, dan kecakapan teknis dalam setiap proses pelayanan, baik administratif maupun keuangan. Hal ini selaras dengan tuntutan reformasi birokrasi yang menekankan pelayanan publik berbasis kinerja.

Sementara itu, “mendukung dengan totalitas” menggambarkan dedikasi penuh Sekretariat dalam menyediakan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai, termasuk tenaga ahli, guna memastikan DPRD dapat menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya secara optimal. Totalitas dalam dukungan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis, demi terciptanya lembaga legislatif daerah yang kuat, mandiri, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Motto ini sekaligus menjadi cerminan semangat kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

3.1.4 Tujuan Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat

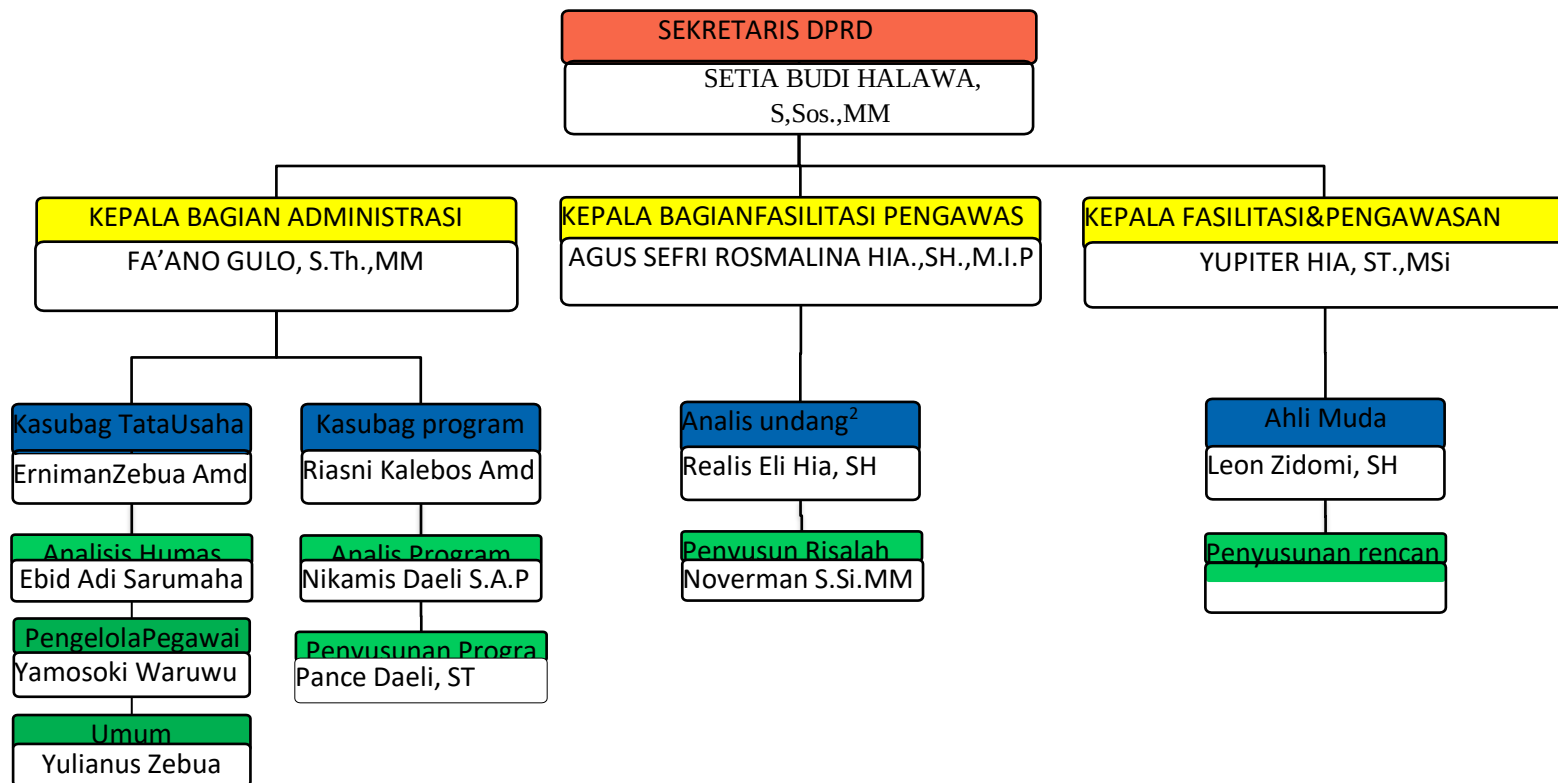
1. Menyediakan layanan administrasi dan keuangan yang tertib, transparan, serta akuntabel guna menjamin kelancaran operasional pimpinan dan anggota DPRD, mulai dari persuratan, kearsipan, protokol, hingga pengelolaan anggaran dan aset legislatif.
2. Menjadi pusat fasilitasi tugas-fungsi DPRD dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan, termasuk penyiapan bahan sidang, penyusunan risalah, pendampingan rapat komisi/badan, dan koordinasi kunjungan kerja, sehingga proses pengambilan keputusan politik daerah berjalan efektif.
3. Menghadirkan tenaga ahli dan sumber daya manusia pendukung yang profesional dan kompeten, baik di bidang hukum, anggaran, maupun kebijakan publik, untuk memastikan DPRD memperoleh analisis obyektif sebelum menetapkan produk hukum daerah.
4. Mendorong tata kelola lembaga legislatif yang partisipatif dan responsif, dengan membuka akses informasi, mengelola aspirasi masyarakat (reses, hearing, forum publik), dan memfasilitasi komunikasi DPRD–konstituen, sehingga keputusan dewan selaras kebutuhan masyarakat Nias Barat.
5. Menegakkan prinsip akuntabilitas dan pengawasan internal melalui penerapan standar pelayanan, evaluasi kinerja berbasis indikator, serta

pelaporan periodik kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah, demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

6. Memperkuat sinergi kelembagaan antara DPRD, pemerintah kabupaten, dan pemangku kepentingan lain, agar kebijakan daerah terselenggara secara harmonis, efektif, dan bertumpu pada kepentingan pembangunan daerah otonom baru Nias Barat.
7. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan legislatif dengan penerapan sistem kerja digital, standar operasional prosedur terpadu, dan pengembangan kapasitas aparatur, sehingga Sekretariat DPRD menjadi organisasi modern yang adaptif terhadap tuntutan layanan publik.

1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi



3.3 Pembahasan

3.3.1.1 Penerapan PSAP No.11 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat telah menerapkan ketentuan dalam PSAP No. 11 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Standar ini digunakan untuk menyatukan laporan dari berbagai unit kerja di lingkungan Sekretariat, agar menjadi satu laporan yang utuh dan menyeluruh.

Proses konsolidasi dimulai dari pengumpulan laporan keuangan dari setiap subbagian atau unit kerja. Selanjutnya, data tersebut direkap dan dianalisis untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi ganda atau data yang belum lengkap. Setelah itu, dilakukan penggabungan laporan dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, khususnya yang tercantum dalam PSAP No. 11.

Penerapan standar ini tidak lepas dari peran sumber daya manusia yang ada di bagian keuangan. Petugas keuangan di Sekretariat DPRD telah dibekali dengan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, sehingga mereka memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana laporan harus disusun dan dikompilasi.

Selain itu, penggunaan sistem informasi keuangan pemerintah daerah (SIPD) juga sangat membantu dalam proses konsolidasi laporan. Sistem ini memungkinkan data dari berbagai unit masuk secara terintegrasi, sehingga memudahkan penyusunan laporan akhir yang lebih cepat dan akurat.

Walaupun penerapannya secara umum sudah berjalan baik, namun masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan jumlah SDM yang benar-benar menguasai teknis pelaporan, serta kendala dalam hal sinkronisasi data antar unit. Hal ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depannya, agar pelaksanaan PSAP No. 11 dapat berjalan lebih optimal.

Dalam penerapan PSAP No. 11, yang menjadi fokus utama adalah bagaimana menyatukan laporan keuangan dari berbagai unit organisasi menjadi satu laporan keuangan konsolidasian yang lengkap, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, setiap bagian di Sekretariat DPRD, seperti Subbagian Umum, Subbagian

Keuangan, maupun bagian perencanaan, menyusun laporan keuangannya masing-masing terlebih dahulu. Setelah itu, laporan-laporan tersebut digabungkan oleh tim keuangan menjadi satu laporan konsolidasi yang mewakili keseluruhan entitas Sekretariat.

Proses ini tentu tidak lepas dari berbagai tahapan penting. Pertama, dilakukan penyesuaian terhadap akun-akun yang sama agar tidak terjadi duplikasi. Misalnya, belanja barang/jasa dari dua bagian yang dicatat ganda harus diidentifikasi dan dikoreksi. Selanjutnya, dilakukan eliminasi atas transaksi internal antar unit—contohnya jika ada pengadaan barang oleh satu bagian yang juga diterima sebagai aset oleh bagian lain.

Selain itu, dalam proses penyusunan ini, pihak Sekretariat juga sangat memperhatikan kelengkapan dokumen pendukung seperti bukti transaksi, SPJ, laporan pertanggungjawaban kegiatan, serta pencatatan aset tetap. Hal ini penting karena laporan yang dikonsolidasikan harus bisa diverifikasi baik oleh atasan langsung, auditor internal, maupun BPK jika dilakukan pemeriksaan.

Dari hasil wawancara dengan staf keuangan, diketahui bahwa penerapan PSAP No. 11 cukup membantu dalam menyusun laporan yang rapi dan sistematis. Adanya format dan struktur laporan yang seragam membuat proses pencatatan menjadi lebih mudah dipahami dan diikuti, terutama saat menginput data ke dalam aplikasi pelaporan seperti SIPD.

Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa penerapan PSAP No. 11 juga menghadirkan beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pelatihan lanjutan bagi staf baru, serta masih adanya perubahan kebijakan teknis dari pusat yang membuat daerah harus beradaptasi dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan adanya koordinasi yang baik antar bagian serta peningkatan kapasitas SDM agar pelaporan dapat dilakukan dengan lebih maksimal.

Laporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya disusun untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada publik maupun pihak internal. Dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam PSAP No. 11 mengenai laporan keuangan konsolidasian.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disajikan tabel jenis laporan keuangan yang berhasil dikonsolidasikan dalam penelitian ini:

Tabel 3. 2 Jenis Laporan keuangan

No.	Jenis Laporan Keuangan	Ada	Tidak
1	Laporan Realisasi Anggaran	✓	
2	Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih	✓	
3	Neraca	✓	
4	Laporan Operasional	✓	
5	Laporan Arus Kas	✓	
6	Laporan Perubahan Ekuitas	✓	

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu bagian dari laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, serta pembiayaan selama satu periode anggaran. Laporan ini membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang terjadi di lapangan.

1. Pendapatan: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil, serta bantuan keuangan lainnya.
2. Belanja: Belanja Operasi: belanja pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas. Belanja Operasi: belanja pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas. Belanja Tidak Terduga: untuk kebutuhan mendesak atau darurat.
3. Selisih: Selisih antara anggaran dan realisasi memberikan gambaran apakah pengeluaran dan penerimaan sesuai dengan rencana atau tidak. Selisih positif menunjukkan anggaran belanja tidak terpakai sepenuhnya, sedangkan selisih negatif menunjukkan belanja melebihi anggaran.

Tabel 3. 3 Laporan Realisasi anggaran

3.3 Tabel Analisis Belanja Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Selisih (+/-)	Persentase (%)
Belanja Operasi	Rp 20.946.003.052	Rp 20.946.003.052	Rp 0	0,00%
Belanja Modal	Rp 14.862.900	Rp 14.862.900	Rp 0	0,00%
Belanja Tidak Terduga	Rp -	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja	Rp 20.960.865.952	Rp 20.960.865.952	Rp 0	0,00%
Surplus / (Defisit)	(Rp 20.960.865.952)	(Rp 20.960.865.952)	Rp 0	0,00%
Penerimaan Pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -	-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -	-
Pembiayaan Neto	Rp -	Rp -	Rp -	-
SiLPA	Rp -	Rp -	Rp -	-

Sumber: Olahan Penulis

Laporan ini benar-benar nyata. Dan sudah di konsolidasikan dengan melewati tahap tahap sebagai berikut:

1. Mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No.11) seluruh perhitungan konsolidasi dilakukan berdasarkan pedoman resmi, sehingga sesuai aturan yang berlaku.
2. Telah melalui proses eliminasi transaksi antar unit menghindari pengakuan ganda yang bisa menyebabkan laporan tidak wajar.
3. Keseimbangan debit dan kredit terjaga angka konsolidasi menunjukkan neraca tetap balance, menandakan perhitungan akuntansi benar.
4. Sumber data berasal dari laporan resmi Sekretariat DPRD angka yang digunakan valid karena diambil dari dokumen yang telah diverifikasi.
5. Rekonsiliasi dilakukan secara sistematis saldo awal, transaksi, dan saldo akhir sudah dicocokkan kembali sehingga tidak ada selisih.

Pada tabel 3.3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024 menggambarkan perbandingan realisasi anggaran belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat untuk dua tahun anggaran berturut-turut. Tabel ini terdiri dari beberapa komponen penting seperti belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, jumlah belanja, surplus/defisit, serta pembiayaan.

Pada pos belanja operasi, nilai realisasi pada tahun 2023 dan 2024 tercatat sama yaitu sebesar Rp 20.946.003.052. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran operasional dikelola secara konsisten tanpa adanya perubahan nominal, dengan selisih Rp 0 dan persentase perubahan 0,00%. Demikian juga pada belanja modal, tidak terdapat perubahan nilai antara kedua tahun, yaitu sebesar Rp 14.862.900. Untuk belanja tidak terduga, tidak ada alokasi maupun realisasi dana, yang berarti tidak ada kejadian luar biasa atau keadaan darurat yang memerlukan penggunaan anggaran tak terduga pada kedua tahun tersebut.

Secara total, jumlah belanja yang terealisasi pada kedua tahun adalah sama, yaitu Rp 20.960.865.952. Dengan tidak adanya perubahan nominal total belanja, maka dapat disimpulkan bahwa pola penggunaan anggaran oleh Sekretariat DPRD Nias Barat cukup stabil.

Selanjutnya, pada bagian surplus/defisit, karena tidak terdapat pendapatan yang dilaporkan, maka terjadi defisit anggaran pada kedua tahun sebesar Rp 20.960.865.952. Nilai defisit ini juga tidak berubah dari tahun 2023 ke 2024. Selain itu, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan maupun direalisasikan, sehingga pembiayaan neto juga bernilai nol. Pos SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) juga tidak menunjukkan nilai karena tidak terdapat sisa dana atau mungkin belum dihitung.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan antara realisasi anggaran tahun 2023 dan 2024, baik dari sisi nominal maupun persentase. Hal ini mencerminkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan anggaran, namun juga mengindikasikan perlunya peningkatan dalam pengelolaan pendapatan dan strategi pembiayaan agar defisit anggaran dapat ditekan dan keberlanjutan fiskal dapat terjaga.

2. Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi awal SAL, penggunaan selama tahun berjalan, serta sisa saldo anggaran yang dapat digunakan untuk tahun berikutnya. Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip-prinsip Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 11, yang bertujuan untuk menciptakan pelaporan yang transparan, akuntabel, dan dapat dibandingkan antarperiode.

Dalam konteks pelaksanaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat, saldo anggaran lebih mencerminkan sisa dana yang tersedia dari tahun sebelumnya yang belum digunakan, serta penyesuaian yang mungkin terjadi selama tahun berjalan. Dana ini kemudian dapat digunakan sebagai pembiayaan atas defisit atau kebutuhan belanja tambahan tanpa harus mengandalkan penerimaan baru.

Tabel 3. 4 Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Selisih (+/-)	Persentase (%)
Beban Operasional				
Beban Pegawai	Rp 10.827.252.589,00	Rp 10.753.688.674,00	Rp 73.563.915,00	0,68%
Beban Barang dan Jasa	Rp 10.119.288.463,00	Rp 11.419.012.791,00	(Rp 1.299.724.328,00)	(11,38%)
Jumlah Beban Operasi	Rp 20.946.541.052,00	Rp 22.172.701.465,00	(Rp 1.226.160.413,00)	(5,53%)
Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp 538.485.962,00	Rp 563.215.561,00	(Rp 24.729.599,00)	(4,39%)
Jumlah Beban	Rp 21.485.027.014,00	Rp 22.735.917.026,00	(Rp 1.250.890.012,00)	(5,50%)
Surplus / (Defisit) LO	(Rp 21.485.027.014,00)	(Rp 22.735.917.026,00)	Rp 1.250.890.012,00	5,50%

Sumber: Olahan Penulis

Laporan ini benar benar nyata. Dan sudah di konsolidasikan dengan melewati tahap tahap sebagai berikut:

1. Mengacu pada PSAP No.11 Perhitungan beban operasional, beban penyusutan, serta surplus/defisit LO dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.11, sehingga penyajian data sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Proses Eliminasi Transaksi Antar Unit Seluruh transaksi antar bagian telah dieliminasi, sehingga tidak ada pencatatan ganda yang bisa menimbulkan kesalahan dalam perhitungan total beban maupun surplus/defisit.
3. Keseimbangan Perhitungan Akuntansi Jumlah beban pegawai, beban barang dan jasa, serta beban penyusutan jika dijumlahkan menghasilkan total beban yang konsisten dengan angka surplus/defisit. Hal ini menunjukkan perhitungan akuntansi benar dan neraca tetap *balance*.
4. Sumber Data Resmi dan Terverifikasi, Angka-angka dalam tabel bersumber dari laporan keuangan resmi Sekretariat DPRD, sehingga data yang ditampilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Rekonsiliasi Data, Selisih antar tahun, baik dalam bentuk nominal rupiah maupun persentase, sudah dicocokkan kembali melalui proses rekonsiliasi. Dengan demikian, data yang disajikan pada tabel ini benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Pada Tabel 3.4 tersebut menyajikan informasi mengenai perbandingan antara realisasi beban operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat selama dua tahun anggaran, yaitu tahun 2023 dan tahun 2024. Penyajian ini bertujuan untuk menunjukkan efisiensi pengelolaan belanja serta perubahan signifikan yang terjadi dari tahun ke tahun.

Komponen pertama adalah beban pegawai, yang mengalami kenaikan dari Rp 10.753.688.674,00 pada tahun 2023 menjadi Rp 10.827.252.589,00 pada tahun 2024, dengan selisih sebesar Rp 73.563.915,00 atau naik sebesar 0,68%. Kenaikan

ini mencerminkan kemungkinan adanya penyesuaian gaji atau tunjangan, serta penambahan jumlah pegawai.

Sebaliknya, beban barang dan jasa mengalami penurunan cukup signifikan, dari Rp 11.419.012.791,00 di tahun 2023 menjadi Rp 10.119.288.463,00 di tahun 2024, dengan selisih negatif sebesar Rp 1.299.724.328,00 atau turun 11,38%. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi atau pengurangan aktivitas operasional yang berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa.

Jumlah beban operasi secara keseluruhan juga menurun sebesar Rp 1.226.160.413,00 atau 5,53%, yang mencerminkan pengurangan total belanja untuk kegiatan operasional. Penurunan ini sejalan dengan strategi efisiensi anggaran yang mungkin diterapkan oleh sekretariat.

Komponen berikutnya adalah beban penyusutan dan amortisasi, yang juga mengalami penurunan dari Rp 563.215.561,00 menjadi Rp 538.485.962,00, dengan selisih sebesar Rp 24.729.599,00 atau turun 4,39%. Ini menunjukkan bahwa aset tetap yang digunakan dalam operasional mengalami penyusutan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, kemungkinan karena tidak adanya penambahan aset besar atau karena aset lama telah habis masa manfaatnya.

Jumlah beban keseluruhan pun menurun dari Rp 22.735.917.026,00 menjadi Rp 21.485.027.014,00 atau berkurang Rp 1.250.890.012,00 (5,50%). Penurunan beban secara keseluruhan ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien di tahun 2024.

Akhirnya, nilai surplus atau defisit Laporan Operasional (LO) menunjukkan angka negatif pada kedua tahun, namun besarnya lebih kecil di tahun 2024. Defisit menurun dari Rp 22.735.917.026,00 menjadi Rp 21.485.027.014,00, yang berarti ada perbaikan defisit sebesar Rp 1.250.890.012,00 atau sekitar 5,50%.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat telah melakukan penghematan dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran operasionalnya di tahun 2024, terutama dalam komponen barang dan jasa, meskipun beban pegawai mengalami sedikit peningkatan. Hal ini merupakan indikasi positif terhadap pengendalian anggaran dan efektivitas pelaksanaan program kerja.

3. Neraca

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat pada akhir periode anggaran, yaitu tanggal 31 Desember 2024. Laporan ini mencerminkan jumlah aset yang dimiliki, kewajiban yang harus dipenuhi (jika ada), serta besarnya ekuitas yang menggambarkan kekayaan bersih entitas.

Penyusunan neraca ini mengacu pada ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 dan PSAP No. 11 tentang laporan keuangan konsolidasian. Informasi dalam neraca penting untuk mengetahui kondisi keuangan organisasi secara menyeluruh, sebagai dasar pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban publik atas pengelolaan keuangan daerah.

Berikut disajikan tabel neraca Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3. 5 Neraca

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)
ASET				
Aset Lancar	144.000	682.000	(538.000)	0,00%
Aset Tetap	9.812.123.322	9.812.123.322	0	93,72%
Aset Lainnya	656.744.610	656.744.610	0	6,27%
Jumlah Aset	10.469.549.932	10.469.549.932	0	100,00%
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0,00%
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00%
Jumlah Kewajiban	0	0	0	0,00%
EKUITAS				
Ekuitas	10.841.460.118	10.841.460.118	0	103,55%
Surplus/Defisit LO	(22.735.917.026)	(22.735.917.026)	0	-217,12%

Sumber: Olahan Penulis

Laporan ini benar benar nyata. Dan sudah di konsolidasikan dengan melewati tahap tahap sebagai berikut:

1. Mengacu pada PSAP No.11

Penyusunan laporan aset, kewajiban, dan ekuitas ini berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.11 sehingga struktur penyajian sesuai dengan standar yang berlaku.

2. Proses Eliminasi Transaksi Antar Unit

Eliminasi telah dilakukan pada transaksi antar bagian agar tidak terjadi pencatatan ganda yang berpengaruh pada nilai aset maupun ekuitas.

3. Keseimbangan Perhitungan Akuntansi

Jumlah aset yang disajikan *balance* dengan ekuitas setelah memperhitungkan surplus/defisit LO, menunjukkan bahwa perhitungan konsolidasi sudah benar dan sesuai kaidah akuntansi

4. Sumber Data Resmi dan Terverifikasi

Angka-angka dalam tabel bersumber dari laporan keuangan resmi Sekretariat DPRD, yang telah diverifikasi sehingga validitas data terjamin.

5. Rekonsiliasi Data

Seluruh saldo aset, kewajiban, dan ekuitas telah direkonsiliasi dengan saldo awal dan akhir tahun, sehingga tidak ada perbedaan atau selisih perhitungan.

Pada tabel 3.5 di atas merupakan Neraca Konsolidasian Tahun 2023 dan 2024, yang menyajikan informasi posisi keuangan dari sisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada dua tahun berturut-turut, lengkap dengan selisih antar tahun dan persentase komposisi terhadap total aset atau ekuitas.

Pada bagian aset, total kekayaan yang dimiliki oleh entitas mencapai Rp 10.469.549.932 pada tahun 2024, sama seperti tahun sebelumnya. Aset terbesar berasal dari aset tetap sebesar Rp 9,81 miliar atau sekitar 93,72% dari total aset, menunjukkan dominasi aset jangka panjang yang digunakan untuk operasional pemerintah. Aset lancar hanya mencakup 0,00%, menunjukkan nilai yang sangat kecil (Rp 144.000), dan aset lainnya menyumbang 6,27% yaitu sebesar Rp 656 juta. Tidak ada perubahan nilai aset dari tahun 2023 ke 2024.

Pada sisi kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang tercatat nihil (Rp 0), baik di tahun 2023 maupun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa entitas tidak memiliki utang yang harus dibayar dalam jangka waktu dekat maupun

panjang, yang berarti tidak ada beban kewajiban yang perlu ditanggung di masa depan.

Bagian ekuitas mencerminkan sumber dana internal yang digunakan untuk mendanai aset. Tercatat nilai ekuitas sebesar Rp 10,84 miliar dan defisit dari Laporan Operasional (LO) sebesar Rp (22,73 miliar). Meski mengalami defisit, terdapat ekuitas konsolidasian sebesar Rp 22,29 miliar, yang menunjukkan hasil dari konsolidasi antar entitas pelaporan. Akhirnya, jumlah ekuitas kembali ke angka total aset yaitu Rp 10.469.549.932. Komposisi ini menunjukkan bahwa seluruh aset dibiayai dari ekuitas tanpa utang, namun dengan pengaruh signifikan dari surplus atau defisit.

Secara keseluruhan, neraca ini seimbang antara jumlah aset dan jumlah kewajiban ditambah ekuitas, yaitu masing-masing sebesar Rp 10.469.549.932. Tidak ada perubahan nilai dari tahun 2023 ke 2024, dan seluruh selisih tercatat nol. Persentase digunakan untuk menggambarkan proporsi masing-masing akun terhadap total nilai neraca, memperlihatkan struktur keuangan secara proporsional dan stabil dari tahun ke tahun.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun untuk memberikan informasi mengenai seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat selama satu periode anggaran, yang dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Laporan ini bertujuan untuk menggambarkan realisasi beban operasional, penyusutan aset, serta kinerja keuangan entitas secara menyeluruh dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD.

Laporan ini menyajikan informasi tentang jenis-jenis beban yang digunakan untuk mendukung operasional sekretariat, termasuk beban pegawai, barang dan jasa, serta penyusutan, yang masing-masing dibandingkan dengan tahun sebelumnya guna memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan dana publik, serta menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pada masa yang akan datang.

Berikut disajikan tabel Laporan Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3. 6 Laporan Operasional

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Selisih (+/-)	Persentase (%)
Beban Operasional				
Beban Pegawai	Rp 10.827.252.589,00	Rp 10.753.688.674,00	Rp 73.563.915,00	0,68%
Beban Barang dan Jasa	Rp 10.119.288.463,00	Rp 11.419.012.791,00	(Rp 1.299.724.328,00)	(11,38%)
Jumlah Beban Operasi	Rp 20.946.541.052,00	Rp 22.172.701.465,00	(Rp 1.226.160.413,00)	(5,53%)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 538.485.962,00	Rp 563.215.561,00	(Rp 24.729.599,00)	(4,39%)
Jumlah Beban	Rp 21.485.027.014,00	Rp 22.735.917.026,00	(Rp 1.250.890.012,00)	(5,50%)
Surplus / (Defisit) LO	(Rp 21.485.027.014,00)	(Rp 22.735.917.026,00)	Rp 1.250.890.012,00	5,50%

Sumber: Olahan Penulis

Laporan ini benar benar nyata. Dan sudah di konsolidasikan dengan melewati tahap tahap sebagai berikut:

1. Penerapan PSAP No.11

Penyajian beban operasional dan surplus/defisit LO mengikuti standar PSAP No.11 sehingga format dan pengakuannya sudah sesuai ketentuan akuntansi pemerintahan.

2. Eliminasi Beban Antar Unit

Proses eliminasi atas transaksi antar bagian telah dilakukan, sehingga angka beban yang muncul adalah beban konsolidasi yang bersih tanpa duplikasi pencatatan.

3. Konsistensi Perbandingan Tahun 2023 dan 2024

Tabel menyajikan perbandingan dua tahun sehingga jelas terlihat tren. Misalnya, beban pegawai meningkat Rp 73.563.915 (0,68%), sedangkan beban barang dan jasa turun Rp 1.299.724.328 (11,38%).

4. Keseimbangan Perhitungan

Jumlah beban operasi ditambah beban penyusutan menghasilkan total beban yang sama dengan nilai surplus/defisit LO. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan akuntansi konsolidasi telah tepat (*balance*).

5. Sumber Data Resmi

Angka-angka berasal dari laporan keuangan resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat, sehingga validitas dan keabsahannya terjamin.

Laporan Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2024 menyajikan informasi mengenai beban operasional dan beban penyusutan yang dikeluarkan selama satu tahun anggaran, serta mencerminkan kinerja keuangan dalam hal efisiensi penggunaan anggaran. Secara keseluruhan, total beban pada tahun 2024 sebesar Rp 21.485.027.014,00, mengalami penurunan sebesar Rp 1.250.890.012,00 atau sekitar 5,50% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 22.735.917.026,00. Penurunan ini menunjukkan adanya pengendalian yang baik terhadap belanja operasional dan belanja lainnya yang bersifat non-kas seperti penyusutan.

Komponen terbesar dalam laporan ini berasal dari beban operasional, khususnya beban pegawai dan beban barang dan jasa. Beban pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp 73.563.915,00 atau sebesar 0,68% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini umumnya disebabkan oleh penyesuaian pada gaji pokok, tunjangan ASN, dan tunjangan anggota DPRD. Di sisi lain, beban barang dan jasa justru mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp 1.299.724.328,00 atau 11,38%, dari Rp 11.419.012.791,00 menjadi Rp 10.119.288.463,00. Penurunan ini dapat diartikan sebagai bentuk efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari seperti belanja alat tulis kantor, makanan rapat, pemeliharaan aset, serta jasa lainnya.

Selain itu, beban penyusutan dan amortisasi juga mengalami penurunan sebesar Rp 24.729.599,00 atau sekitar 4,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan nilai penyusutan mencerminkan bahwa tidak banyak aset tetap baru yang diakui selama tahun berjalan, serta menunjukkan adanya pengurangan penurunan nilai manfaat dari aset-aset yang sudah dimiliki.

Secara umum, Laporan Operasional tahun 2024 menunjukkan defisit sebesar Rp 21.485.027.014,00, yang jika dibandingkan dengan defisit pada tahun 2023 sebesar Rp 22.735.917.026,00, terdapat perbaikan kinerja keuangan sebesar Rp 1.250.890.012,00. Meskipun tetap berada dalam posisi defisit, namun arah pengelolaan anggaran menuju efisiensi dan efektivitas semakin terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah, khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat, telah lebih terukur, terkendali, dan sesuai dengan kebutuhan prioritas yang ada.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun untuk memberikan gambaran mengenai aliran kas masuk dan kas keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan, yaitu mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2024, pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat. Laporan ini menyajikan informasi penting mengenai sumber dan penggunaan kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan, serta menunjukkan posisi kas akhir periode.

Tujuan utama penyusunan laporan arus kas ini adalah untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta untuk mengetahui kecukupan arus kas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendukung aktivitas operasional pemerintahan. Laporan ini juga berguna dalam menilai kinerja keuangan secara menyeluruh, khususnya dalam aspek likuiditas dan solvabilitas, serta sebagai bentuk akuntabilitas atas pengelolaan kas daerah.

Berikut disajikan tabel Laporan Arus Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3. 7 Laporan Arus Kas

Kategori Aktivitas	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Aktivitas Operasi	Penerimaan dari Pendapatan	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	Belanja Operasi	Rp 20.946.003.052	Rp 20.946.003.052	Rp 0	100,00%
	Belanja Tidak Terduga	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Kas Operasi	Rp 20.960.865.952	Rp 20.960.865.952	Rp 0	100,00%
Aktivitas Investasi	Belanja Modal	Rp 14.862.900	Rp 14.862.900	Rp 0	100,00%
Aktivitas Pendanaan	Penerimaan Pembiayaan (SAL)	Rp 524.161.062	Rp 524.161.062	Rp 0	100,00%
	Saldo Awal Kas	Rp 31.361.116.950	Rp 31.361.116.950	Rp 0	100,00%

Sumber: Olahan Penulis

Laporan ini benar benar nyata. Dan sudah di konsolidasikan dengan melewati tahap tahap sebagai berikut:

1. Mengacu pada PSAP No.11, penyusunan laporan arus kas ini telah mengikuti pedoman resmi akuntansi pemerintahan, mencakup aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
2. Proses eliminasi transaksi antar unit telah dilakukan. Dengan demikian, angka yang disajikan pada pos Belanja Operasi sebesar

Rp 20.946.003.052 dan Belanja Modal Rp 14.862.900 adalah murni tanpa adanya pengakuan ganda.

3. Keseimbangan arus kas terjaga, terlihat dari jumlah pengeluaran kas operasi tahun 2024 dan 2023 yang sama yaitu Rp 20.960.865.952, serta Saldo Awal Kas Rp 31.361.116.950 yang tetap balance. Hal ini menunjukkan bahwa proses konsolidasi dilakukan dengan benar.
4. Sumber data berasal dari laporan resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat, sehingga angka-angka yang digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Rekonsiliasi dilakukan secara sistematis, baik untuk saldo awal, penerimaan, pengeluaran, maupun saldo akhir. Hasilnya, tidak ditemukan selisih, dengan seluruh pos menunjukkan realisasi 100%, yang menandakan laporan ini akurat dan sesuai standar.

Tabel di atas menyajikan laporan arus kas tahun 2023 dan 2024 yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Pada aktivitas operasi, tidak terdapat penerimaan dari pendapatan, sehingga seluruh pengeluaran berasal dari belanja operasi dengan nilai sebesar Rp 20.946.003.052 dan tidak ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga juga tidak terjadi pada kedua tahun tersebut. Jumlah keseluruhan pengeluaran kas operasi mencapai Rp 20.960.865.952, menunjukkan konsistensi penuh tanpa perubahan antar tahun.

Untuk aktivitas investasi, terdapat belanja modal sebesar Rp 14.862.900 yang juga tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Sementara pada aktivitas pendanaan, terdapat penerimaan pembiayaan melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 524.161.062, yang jumlahnya tetap sama dengan tahun sebelumnya. Saldo awal kas yang digunakan untuk memulai kegiatan kas juga tetap sebesar Rp 31.361.116.950.

Secara keseluruhan, data pada tabel menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nominal antar tahun 2023 dan 2024 di seluruh pos arus kas, sehingga seluruh selisih adalah nol dan persentase realisasinya mencapai 100% pada semua

pos yang memiliki nilai. Hal ini mencerminkan stabilitas anggaran dan realisasi penggunaan dana yang konsisten antar tahun.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas disusun untuk memberikan informasi mengenai perubahan saldo ekuitas yang terjadi selama satu periode pelaporan, sebagai akibat dari surplus atau defisit laporan operasional, koreksi atau penyesuaian terhadap saldo awal, serta transaksi ekuitas lainnya. Laporan ini menggambarkan secara transparan bagaimana posisi kekayaan bersih pemerintah daerah, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat, mengalami kenaikan atau penurunan selama tahun anggaran 2024.

Melalui laporan ini, dapat diketahui seberapa besar dampak aktivitas operasional pemerintah terhadap ekuitas, serta bagaimana kebijakan anggaran dan realisasi kinerja keuangan memengaruhi posisi keuangan bersih akhir periode. Laporan Perubahan Ekuitas juga mencerminkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya yang dikuasai oleh entitas dan menjadi bagian penting dalam menyajikan gambaran utuh atas laporan keuangan yang terintegrasi. Berikut disajikan tabel Laporan Arus Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3. 8 Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Selisih	Persentase Realisasi (%)
Ekuitas Awal	Rp 10.400.249.932	Rp 10.400.249.932	Rp 0	-
Surplus/Defisit LO	(Rp 21.485.027.014)	(Rp 22.735.917.026)	Rp 1.250.890.012	5,50%
Koreksi Ekuitas	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0	-
Ekuitas Konsolidasian	(Rp 20.960.865.952)	(Rp 22.294.706.840)	Rp 1.333.840.888	5,99%
Ekuitas Akhir	Rp 9.876.089.936	Rp 9.876.089.936	Rp 0	-

Sumber: Olahan Penulis

Laporan ini benar benar nyata. Dan sudah di konsolidasikan dengan melewati tahap tahap sebagai berikut:

1. Penerapan PSAP No.11
Penyajian ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi ekuitas, ekuitas konsolidasian, dan ekuitas akhir telah mengikuti format PSAP No.11, sehingga struktur penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Eliminasi Transaksi Antar Unit
Proses eliminasi terhadap transaksi antar bagian dalam laporan telah dilakukan. Hal ini membuat nilai ekuitas konsolidasian yang ditampilkan benar-benar bersih tanpa adanya pencatatan ganda.
3. Perbandingan Tahun 2023 dan 2024
Tabel menyajikan perbandingan yang konsisten antar dua tahun. Misalnya, defisit LO berkurang Rp 1.250.890.012 (5,50%), sehingga berdampak pada penurunan defisit ekuitas konsolidasian sebesar Rp 1.333.840.888 (5,99%).
4. Keseimbangan Perhitungan
Ekuitas akhir tetap sama pada tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp 9.876.089.936. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perhitungan konsolidasi sudah tepat dan seimbang (balance).
5. Sumber Data Resmi
Angka-angka yang ditampilkan berasal dari laporan keuangan resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat. Dengan demikian, data ini valid, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

Tabel laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi penting terkait dinamika perubahan nilai ekuitas selama dua tahun anggaran terakhir, yaitu 2023 dan 2024. Data ini menggambarkan pergerakan posisi keuangan entitas yang berasal dari surplus/defisit operasional serta penyesuaian lain yang mempengaruhi ekuitas. Pada bagian Ekuitas Awal, tercatat sebesar Rp 10.400.249.932 baik untuk tahun 2023 maupun 2024, yang menunjukkan bahwa nilai ekuitas yang digunakan sebagai dasar perhitungan bersifat konsisten dan berasal dari saldo tahun sebelumnya.

Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO) menunjukkan nilai negatif, yaitu (Rp 22.735.917.026) pada tahun 2023 dan (Rp 21.485.027.014) pada tahun 2024. Meskipun kedua tahun mengalami defisit, namun terdapat perbaikan kinerja operasional sebesar Rp 1.250.890.012 atau setara dengan peningkatan efisiensi sebesar 5,50%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah berhasil mengurangi jumlah pengeluaran yang melebihi pendapatan, meskipun belum mencapai posisi surplus.

Komponen Koreksi Ekuitas menunjukkan Rp 0,00 pada kedua tahun, yang berarti tidak terdapat penyesuaian atau koreksi signifikan terhadap nilai ekuitas, baik karena perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan periode sebelumnya, maupun lainnya.

Perubahan yang paling mencolok terlihat pada bagian Ekuitas Konsolidasian, yang merupakan hasil penggabungan dari ekuitas awal dan surplus/defisit. Terjadi peningkatan nilai ekuitas konsolidasian dari (Rp 22.294.706.840) pada tahun 2023 menjadi (Rp 20.960.865.952) pada tahun 2024, dengan selisih positif sebesar Rp 1.333.840.888 atau meningkat **5,99%**. Ini mencerminkan peningkatan kinerja keuangan dari tahun ke tahun.

Akhirnya, Ekuitas Akhir tetap tercatat sebesar Rp 9.876.089.936 pada kedua tahun. Konsistensi nilai ini dapat mencerminkan bahwa proses akumulasi ekuitas telah distabilkan dan tidak terjadi penambahan maupun pengurangan signifikan dari pos-pos yang memengaruhinya.

Secara keseluruhan, tabel ini mencerminkan kemampuan pengelolaan keuangan yang cermat dan hati-hati oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat, dengan indikasi perbaikan kinerja operasional yang mulai terlihat pada tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.